



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	20
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat 1. Dirut Bank Mandiri;
Dengan	:	2. Dirut Bank BRI; 3. Dirut Bank BNI.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Kamis, 4 Juli 2019
Waktu	:	14.00 WIB s.d 17.20 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat	:	Melchias Markus Mekeng
Sekretaris Rapat	:	Drs. Urip Soedjarwono
Acara	:	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Hadir	:	1. DIRUT BANK MANDIRI/KARTIKA WIRJOATMODJO; 2. DIRUT BANK BRI/SUPRAJARTO; 3. DIRUT BANK BNI/ACHMAD BAIQUNI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR/F-PAN):

.... (suara tidak terekam) Izin 2 orang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijin kami membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Dirut Bank Mandiri, Dirut PT. Bank BRI, Dirut PT. Bank Negara Indonesia. Dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Mengawali Rapat Dengar Pendapat kita pada sore hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita bisa dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat pada siang hari ini.

F-PPP (HM. AMIR USKARA, M. Kes.):

Interupsi Pimpinan.

Mungkin sebelum kita lanjut bahannya mungkin bisa kita bagikan. Sudah ya? belum ada nih.

KETUA RAPAT:

Yang meja ini baru Mandiri dan BRI, yang BNI belum ada ya.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Bahwa amanat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Bank Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap tiga BUMN Perbankan pada hari ini adalah Mandiri, pemeriksaan kinerja, efektifitas kegiatan akuisisi, literisasi dan pretense atas collection Mandiri, pemeriksaan atas pengelolaan kredit segmen corporate banking dan penyelesaian serta penyelesaian kredit banking. BRI pemeriksaan atas pengelolaan kredit segmen korporasi tahun buku 2016-2017 pada BRI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dengan pengelolaan dana pihak ketiga, trade finance money market sekuritas tahun 2016, 2017, Kantor Cabang Luar Negeri New York. BNI pemeriksaan atas pengelolaan operasional kantor cabang luar negeri tahun 2015, pemeriksaan atas pengelolaan kredit segmen korporasi tahun 2016,

pemeriksaan atas pengelolaan kredit BNI Griya tahun 2017, pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan segmen komersial tahun 2017 dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dengan operasional divisi internasional dan kantor cabang luar negeri.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kami persilakan masing-masing direksi untuk memberikan penjelasan terhadap agenda kita pada siang hari ini. Kami persilakan pada Bank Mandiri.

DIRUT BANK MANDIRI (KARTIKA WIRJOATMODJO):

Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Pimpinan Komisi XI DPR RI dan para Anggota Komisi XI DPR RI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk hari ini memaparkan mengenai tindak lanjut atas temuan BPK. Seperti yang disampaikan Bapak Ketua tadi khususnya terhadap temuan BPK tahun 2017 terkait dengan pengelolaan kredit di segmen *wholesale*. Sebelum masuk ke materi mengenai temuan BPK dan tindaklanjutnya, kami mohon waktu untuk menjelaskan mengenai kinerja kami di triwulan I tahun 2019 yang lalu sebagai back ground dan nanti untuk melihat perbaikan-perbaikan yang telah kita lakukan selama 2,5 tahun terakhir. Khususnya dalam menghadapi permasalahan NPL sebagaimana yang menjadi temuan BPK pada waktu melakukan audit tahun 2017.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Dapat kami paparkan disini dari capaian kinerja kami di triwulan I yang lalu. Pertumbuhan kredit kami secara konsolidasi mencapai 12,4% sehingga mencapai 790,5 triliun. NPL gross kami *alhamdulillah* terus menurun mencapai 2,68% pada maret yang lalu dan pertumbuhan laba mencapai 23,4% dimana laba kami di triwulan I kemarin mencapai 7,2 triliun. Dari sisi aset konsolidasi kami mencapai 1.206 triliun dan dana pihak ketiga mencapai 827,8 triliun dengan net interest margin di 5,66%.

Dari sisi cost income ratio kami mencapai 42%, dan dari capital ratio sekarang kami mencapai 22,47% sehingga secara kinerja maupun secara kekuatan modal kami saat ini bank dalam kondisi yang sehat dan telah banyak mengalami perbaikan terutama dari sisi penurunan NPL.

Yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kami lihat di halaman berikutnya ini memang setelah terjadinya commodity di tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri terjadi peningkatan NPL yang cukup signifikan sehingga pada puncaknya di sekitar triwulan 4 2016 NPL kami pernah mencapai 4%. Dan pada waktu itu kita harus melakukan pencadangan yang cukup signifikan sehingga laba kami menurun. Setelah itu secara bertahap berangsur-angsur kami turunkan NPL dari 4% saat ini dikisaran

26,8% dengan restrukturisasi penagihan likuidasi maupun juga peningkatan pencadangan dan *rate off*.

Jadi dalam slide ini dapat kita lihat bahwa seiring dengan peningkatan kredit kami juga disisi lain NPL kami terus menurun dan kami harapkan di akhir tahun ini secara ratio NPL kami bisa mencapai 2,5% dan leverage pencadangan kami juga mencapai 150% daripada NPL yang masih ada di buku kami. Sehingga bisa kami sampaikan bahwa di tahun 2019 secara kekuatan dari sisi kredit risk kami bisa kembali ke level yang cukup normal.

Halaman berikutnya, dari sisi pertumbuhan kredit ada dua sektor utama yang kami fokuskan selama 2-3 tahun terakhir. Yang pertama tentunya dukungan kami kepada kredit infrastruktur, di mana total mencapai 177,8 triliun tumbuh hampir 30% year on year, di mana sektor-sektor utama yang menjadi target untuk pertumbuhan kami yang paling utama ada di transportasi, di listrik, migas, dan juga pembangunan jalan dan konstruksi. Kami banyak membiayai proyek-proyek jalan tol, baik di Jawa maupun Sumatera, pembangunan IBD-IBD bersama PLN dan juga pembangunan berbagai pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang dilakukan oleh Angkasa Pura dan Pelindo.

Dari sisi karena kredit mikro kami juga tumbuh cukup agresif, KUR kami tumbuh 38,9% saat ini mencapai 23,6 triliun. Platform kami tahun lalu 14 triliun dan tahun ini platform kami mencapai 25 triliun dan khususnya kita akan dorong masuk ke segmen sektor per produktif dimana justru ada pertanyaan paling kanan yang saat ini mencapai 658 miliar. Kemudian pengolahan memang masih kecil, memang fokusnya saat ini memang masih banyak diperdagangan dan jasa. Tapi kami di tahun 2019 ini akan mulai menggeser sebagian alokasi KUR kami masuk ke dalam sektor produktif khususnya di pertanian dan perikanan.

Dari sisi kontribusi langsung pada ...(suara tidak jelas) Pemerintah melalui fungsi agent of development kami bersama-sama bank Himbara, BRI, BNI dan BTN, saat ini menjadi penyalur dari Bansos, Program PKH dan BPNT, kemudian kartu tani dan berbagai program industry keuangan yang dilaksanakan oleh OJK dan BI, yaitu agent bank maupun LKD, sehingga diharapkan dengan program industry keuangan ini peningkatan daripada jumlah masyarakat Indonesia yang punya account perbankan bisa meningkat dengan target dikisaran 75% di tahun 2020.

Dari sisi kontribusi kepada fiskal di tahun 2018 yang lalu kami memberikan kontribusi sebesar 18,6 triliun di mana 11,87 triliun dilakukan melalui pemotongan pajak khususnya dari PPH bunga dan juga PPH penghasilan bank, kemudian juga dari deviden tahun lalu kami menyetorkan 6,7 triliun deviden kepada Pemerintah. Dan kami *alhamdulillah* tahun lalu juga mendapatkan beberapa penghargaan dan terakhir di sekitar sebulan yang lalu kami mendapatkan peningkatan rating dari sisi rating internasional kami, yaitu S&P Fitch yang saat ini ada di triple b minus mengikuti perubahan pendekatan rating dari sovereign rating kami. Dan ada beberapa penghargaan lain seperti ...(suara tidak jelas) Yang sama-sama dengan Bank BNI, BRI kita juga masuk kepada ranking perusahaan-perusahaan terbesar di dunia.

Itu sekilas yang dapat kami sampaikan kondisi terkini perusahaan.

Selanjutnya mengenai hasil pemeriksaan BPK, ini mohon maaf Pak, belum kami bagikan secara detail karena nanti kalau terbuka ini sifatnya tapi nanti tetap ada tampilannya.

Di penilaian BPK pada waktu audit terkait dengan segmen kami di tahun 2017 memang fokusnya pada waktu sangat diarahkan kepada kualitas kredit dan penanganan kredit yang bermasalah. Ada sekitar 18 perusahaan yang menjadi temuan, di mana dari 18 perusahaan tersebut ada 44 tindak lanjut yang harus kami laksanakan dan saat ini 44 tindak lanjut ini telah kami laksanakan secara penuh. Dan tindak lanjut ini beragam sekali mulai dari penjualan aset, likuidasi sampai dengan pelaporan kepada pihak berwajib. Jadi ada beberapa yang direkomendasikan untuk melakukan pelaporan kepada Kejaksaan ataupun kepada Kepolisian.

Dari kondisi terkini halaman berikutnya, dari 18 perusahaan yang menjadi objek daripada audit BPK saat ini sebagian besar ada di kepailitan dan PKPU. Jadi dalam berbagai state-nya ada dalam kondisi pemberesan aset rakulator, ada yang dalam kondisi lelang, ada yang dalam kondisi pemberesan aset, dan sebagainya. Dan di harapkan dalam 1-2 tahun ke depan dari perusahaan-perusahaan yang saat ini dalam kondisi likuidasi ini di harapkan memang ada recovery dari sisi penjualan aset khususnya.

Kemudian ada satu debitur yang lunas dan kemudian ada 4 yang saat ini melakukan restrukturisasi melalui PKPU, ada beberapa nama, 4 nama, ini mungkin kalau Bapak dan Ibu yang cukup familiar mungkin yang sempat menjadi topik di media beberapa waktu yang lalu adalah Tirta Amarta Bottling yang di Bandung itu sempat masuk di media itu saat ini dalam posisi restrukturisasi melalui PKPU dan saat ini statusnya sedang homologasi. Kemudian ada dua yang dalam kondisi eksekusi agunan dan dua dalam fase untuk penyelesaian dengan pembayaran pokok dan angsuran bertahap.

Nah, kalau kami lihat berikutnya dari sisi penyebab, ini mungkin juga dibahas cukup dalam dengan auditor bahwa 12 dari temuan itu memang isu utamanya adalah permasalahan tersebut bisnis. Jadi memang karena kondisi bisnis yang menurun dan kemudian struktur dan coverage jaminannya tidak memadai sehingga harus dilakukan restrukturisasi ataupun kepailitan. Ini yang mayoritas sehingga memang yang mayoritas ini lebih kepada isu *business judgement* dan perbaikan dari sisi kualitas penanganan kredit di Bank Mandiri. Namun, ada juga beberapa yang masuk ke teritori hukum. Yang pertama adalah adanya konflik internal perusahaan ini ada satu perusahaan PT. CSI Central Steel ini yang juga sempat masuk ke media karena ini terjadi konflik antar pemegang saham di perusahaan sehingga masuk teritori penanganan hukum di Kejaksaan.

Kemudian ada dua debitur yang ditengarai ada *fraud* yang tidak baik, ini namanya juga cukup familiar, sempat yang masuk di media yang RA ini Rocket all the way ini yang tahun 2016 yang lalu sempat masuk di media. Yang nomor dua ini Tirta Amarta Bottling yang di Bandung yang size-nya cukup besar juga. Jadi dua ini yang memang masuk ke penanganan hukum Rocket ditangani di Kepolisian sedangkan yang Tirta Amarta di Kejaksaan. Kemudian ada tiga yang kita juga ada kelemahan-

kelamahan dari sisi internal, yaitu Maju Bersama, ini ada Puhan dan Eri Guna. Jadi ini semuanya kami terima temuannya, tadi kami sampaikan ada 44 tindaklanjut.

Nah, salah satu tindaklanjut yang memang cukup ditekankan oleh BPK adalah pemberian sanksi internal berikutnya. Jadi kami dari berbagai macam tindaklanjut tadi selain tadi ada penanganan secara hukum, penjualan aset dan sebagainya. Salah satunya ada kami memberikan banyak pembinaan dan teguran internal termasuk PHK. Jadi ada 96 pegawai kami yang sebagai tindaklanjut daripada temuan BPK tersebut, kami melakukan tindakan-tindakan disiplin internal dengan berbagai layernya. Mulai dari layer yang paling ringan pembinaan sampai dengan layer yang paling berat adalah di PHK.

Jadi mungkin sebagai *back ground*, nanti kalau kami masuk ke detailnya mungkin kalau ada pertanyaan. Namun, sebagai *back ground* utama intinya dari temuan-temuan ini secara umum kami 2,5 tahun terakhir ini melakukan perbaikan-perbaikan signifikan dari sisi kebijakan, proses dan sistem kredit kami dan juga melakukan pembinaan-pembinaan secara internal pada pegawai-pegawai yang menangani kredit. Dan dapat disampaikan tadi dari sisi kinerja *insya allah* dengan perbaikan sistem, prosedur, proses *insya allah* kredit Bank Mandiri NPL-nya bisa menurun menuju ke 2,5% dan bisa turun di bawah 2% di tahun depan.

Demikian Bapak Pimpinan, saat ini nanti kami bisa respon detail pada waktu tanya jawab.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Kami persilakan dari Bank BRI.

DIRUT BANK BRI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pimpinan dan Bapak dan Ibu para Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Secara umum sebagaimana disampaikan oleh Bank Mandiri, kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kinerja perusahaan tahun 2019 triwulan I, baik yang terkait dengan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, kredit dan juga kualitas NPL.

Aset BRI triwulan I 2019 tercatat 1.279,9 triliun atau naik sebesar 14,4% dari posisi aset triwulan I tahun 2018 yang tercatat 1.119,2 triliun. Sampai dengan akhir Maret, DPK tumbuh cukup baik di posisi 936 triliun atau naik 13,2% dan pertumbuhan DPK juga masih di atas pertumbuhan DPK industry yang hanya tercatat di 7,2%. Untuk kredit, BRI tumbuh sebesar 12,9% atau sebesar 855,5 triliun di dibandingkan dengan Triwulan I 2018 yang hanya tercatat 757,7 triliun. Dan pertumbuhan kredit ini juga lebih tinggi dari industry yang hanya sekitar 11,6%.

Dengan kinerja yang baik dan efisien, BRI mampu mempertahankan posisi sebagai bank dengan laba tertinggi sejak 14 tahun berturut-turut atau sejak tahun 2005. Sampai dengan Maret 2019 atau triwulan I 2019, BRI memperoleh laba sebesar 8,2 triliun atau meningkat 10,4% di dibandingkan dengan Maret 2018. Dan laba ini khususnya didorong oleh pertumbuhan aset produktif yang berkualitas, efisien, dan biaya operasional maupun pencadangan kerugian penurunan nilai.

Dengan LDR cukup baik 91,4% ini menunjukkan bahwa BRI mampu menjalankan fungsi sebagai intermedia dengan baik. NPL tercatat di 2,4% dan masih juga di bawah industry dengan *coverage ratio* relative tinggi di angka 182,9%. Ini juga menunjukkan bahwa BRI tetap konservatif dalam melihat resiko dan strategi BRI tentunya dalam hal menjaga tingkat *sustainability* dan juga profitabilitas.

Untuk CAR kita juga tercatat masih cukup tinggi di 21,9% atau masih jauh di atas CAR minimum yang di pasarkan Bank Indonesia sebesar 14,75%. Untuk penyaluran kredit kami masih tetap fokus di usaha mikro kecil dan menengah dengan komposisi 76,9% dan sektor UMKM yang mendominasi portofolio penyaluran kredit BRI tercatat senilai 658 triliun dan ini tumbuh 12,5% year on year. Sedangkan untuk seluruh posisi per Maret 2018 per segmen mikro tumbuh 13,2% menjadi 284,1 triliun. Consumer tumbuh 9,6% dan komersial tumbuh 17,1%, korporasi tumbuh 10,7% dan kredit BUMN tumbuh 17,3%.

Untuk penyaluran kredit di sektor pertanian tercatat sebesar 103,5 triliun atau tumbuh sebesar 9,9%. Kemudian perindustrian tumbuh 75,5 triliun atau tumbuh sebesar 59,7%. Kemudian untuk sektor konstruksi tumbuh sebesar 37,2%. Yang juga sangat menggembirakan saat ini adalah kapitalisasi pasar BRI telah tembus di 500 triliun di mana per 1 Juli 2019 kapitalisasi BRI tercatat sebesar 545 triliun dan ini tetap mendudukkan kita menjadi bank ketiga terbesar di Asia Tenggara untuk kapitalisasi.

Selain itu, kami juga cukup banyak melakukan hal-hal yang terkait dengan program Pemerintah, baik dalam hal memperbaiki perekonomian, pemerataan pembangunan, kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan dan juga layanan khususnya adalah yang terkait dengan mikro kecil dan menengah.

Terkait dengan kontribusi langsung kepada Pemerintah, setoran pajak dan deviden setiap tahun terus meningkat seiring dengan terjaganya kinerja positif BRI. Di tahun 2019, kontribusi langsung pajak dan deviden diproyeksikan sebesar 29,2 triliun atau naik 15,9% bila di dibandingkan dengan tahun 2018. Kontribusi tahun 2019 tersebut berasal dari deviden tahun 2018 sebesar 9,2 triliun dan juga penerimaan pajak yang kita setorkan yang kurang lebih mencapai 20 triliun.

Sebagai bank yang tetap fokus di UMKM, BRI telah menyalurkan KUR dari 2015 sampai dengan 2019 kepada lebih dari 14,7 juta debitur dengan plafon kurang

lebih sebesar 209,7 triliun. Selama Januari sampai dengan Mei 2019, BRI telah menyalurkan KUR sebesar 44,3 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur. Penyaluran tersebut setara dengan 51% dari total platform KUR sebesar 86,9 triliun. Adapun realisasi khusus untuk KUR mikro sebesar 38,98 triliun atau 52,2% dari target.

Kemudian kami juga mencangkan untuk portofolio pembiayaan UMKM mencapai 80% dari total kredit yang disalurkan sehingga dapat secara langsung mendukung perekonomian nasional dengan memberikan multiplier effect tentunya melalui pembiayaan. BRI juga mampu membuktikan dalam memberikan kontribusi kepada perekonomian rakyat melalui aset, omzet usaha, pendapatan para pelaku usaha mikro dan kecil. Dan ini juga sudah dikaji oleh LIPI tahun 2018 dan kajian internal kami sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2018 tercatat 2,15 juta debitur berhasil naik kelas.

Pada tahun 2019, Bank BRI menjadi salah satu BUMN yang ditunjuk untuk menyalurkan program Bansos PKH sebanyak 3,9 juta, kemudian BPNT sebanyak 5,9 juta KPM. Selain itu juga PIP Kemendikbud kita salurkan kepada 5,7 juta siswa SD dan SMP yang tersebar di 264 kota/kabupaten dan PKH di 85 kota/kabupaten.

Selanjutnya yang terkait dengan temuan BPK di tahun 2015, kemudian 2017, dan 2018 karena 2016 kita tidak diperiksa oleh BPK. Dapat kami sampaikan bahwa untuk 2015 lebih terkait dengan pengelolaan operasional di BRI New York Agency. Terkait utamanya adalah perencanaan bisnis, kemudian formasi yang masih kurang, kemudian penyusunan LBU dan sebagainya, jadi lebih kepada administrative.

Kemudian yang terkait dengan pengelolaan segmen korporasi di tahun 2017 lebih ke temuan yang terbanyak adalah tentang pelaksanaan, kemudian prinsip kehati-hatian, kemudian juga terkait dengan pembiayaan terhubung atau terkait dengan Capex. Kemudian tahun 2018, temuan yang terbanyak terkait dengan treat finance, money market dan securitas. Dan ini juga lebih ke administrative karena beberapa hal yang ditemukan terkait dengan transaksi yang belum diaplikasikan, kemudian transaksi money market yang belum sesuai dengan ketentuan dan juga terkait dengan penerapan limit belum sesuai dengan potensi pasar yang ada.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK tersebut, terdapat 82 rekomendasi dengan rincian 22 rekomendasi yang terkait yang saya sampaikan tadi. Pengelolaan operasional BRI New York Agency di tahun 2018. Dan kemudian untuk temuan yang terkait dengan kredit korporasi tahun 2017 terdapat 48 rekomendasi. Dan yang terkait dengan yang terakhir, treat finance, money market dan securitas di tahun 2018 terdapat sebanyak 12 rekomendasi.

Dari 82 rekomendasi tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti perbaikannya dan telah disampaikan kepada BPK dengan rincian sebanyak 28 rekomendasi atau 34% sudah mendapatkan putusan selesai. Sedangkan 54 rekomendasi atau 66% masih menunggu selesai dari BPK.

Adapun rencana penyelesaian tindak lanjut dalam jangka pendek terhadap 54 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan sedang menunggu putusan diharapkan mendapat persetujuan selesai dari BPK dengan informasi yang dapat kami sampaikan sebagian debitur telah lunas, kemudian agunan debitur telah dilakukan pengikatan, dan debitur telah melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon nanti kalau ada pendalaman kami akan mempersiapkan hal-hal yang terkait apa yang mungkin masih diharapkan Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Kami persilakan Bank BNI.

DIRUT BANK BNI:

Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang.

**Yang kami hormati Bapak-bapak Pimpinan Sidang,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.**

Perkenalkan kami melanjutkan presentasi yang pertama, menyangkut masalah kinerja keuangan. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan tindak lanjut temuan daripada BPK untuk periode 2015-2018.

Secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa kinerja keuangan BNI hingga kuartal I 2019 masih mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan dengan *highlight* sebagai berikut. Sepanjang periode 2014-2018 total aset BNI tumbuh rata-rata hingga 18% per tahun dari 417 triliun di 2014 menjadi 808 triliun di tahun 2018. Untuk Q1 2019 total aset BNI tumbuh 14,4% year on year menjadi 801 triliun. Pertumbuhan aset BNI didukung oleh kredit BNI yang tumbuh rata-rata hingga 16,6% per tahun dari 278 triliun di tahun 2014 menjadi 513 triliun di tahun 2018. Untuk Q1 2019 kredit BNI tumbuh 18,6% year on year menjadi 521 triliun.

Adapun DPK BNI tumbuh rata-rata hingga 16,5% per tahun dari 314 triliun di tahun 2014 menjadi 579 triliun di tahun 2018. Sedangkan untuk Q1 di tahun 2019 DPK BNI tumbuh 18,6% year on year menjadi 576 triliun.

Kemudian sejalan dengan pertumbuhan aset kredit dan DPK, pertumbuhan laba BNI sepanjang 2014 sampai dengan 2018 mencapai 8,6%. Khusus untuk pertumbuhan laba di Q1 2019 tumbuh sebesar 11,5% year on year mencapai 4,08 triliun. Pencapaian di Q1 ini didukung dengan ROA BNI yang mencapai 2,7% dan NIM yang mencapai 5%. Sementara ROA Industri sebesar 2,6% dan NIM industry 4,8%.

Dari segi biaya, cost to income ratio BNI mencapai level yang cukup baik, yaitu 42,4% sementara BOPO berada di kisaran angka 70,5%. Dari sisi kualitas aset ratio NPL BNI pada Q1 2019 sebesar 1,9% dengan tren perbaikan yang konsisten sejak tahun 2016.

Membaiknya kualitas pembiayaan BNI dibarengi pula dengan naiknya coverage ratio BNI yang menunjukkan bahwa BNI semakin konservatif dalam menangani aspek pembiayaan dan resikonya. Pada Q1 2019 coverage ratio BNI sudah mencapai 153,1% naik dari posisi 140% di periode yang sama di tahun 2017. Sedangkan dari sisi likuiditas, ratio LDR BNI pada Q1 2019 mencapai 91,3%. Tingkat permodalan BNI juga masih cukup baik, yaitu CAR mencapai 19,2% di Q1 2019, masih jauh di atas kebutuhan model minimum yang diisyaratkan oleh regulator.

Kemudian dari penyaluran kredit berdasarkan segmen dari sisi pembiayaan, pinjaman BNI pada Q1 2019 tercatat tumbuh sebesar 18,6% year on year atau mencapai 521,3 triliun. Pertumbuhan kredit didominasi oleh segmen bisnis banking dengan komposisi sekitar 78,7%. Sementara 78,7% dengan tingkat pertumbuhan 20,4% secara year on year. Di segmen bisnis banking, penyaluran pinjaman kepada korporasi dan BUMN mencatat pertumbuhan masing-masing 23,3% dan 26,7% year on year atau mencapai 163 triliun dan 105,7 triliun. Segmen menengah tumbuh 8,4% menjadi 72,7 triliun sementara segmen kredit kecil mencatat pertumbuhan sebesar 18,5% year on year menjadi 68,4 triliun, terutama didorong oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Adapun segmen consumer BNI tumbuh 8,5% year on year menjadi 80,1 triliun. Sementara penyaluran pinjaman melalui anak perusahaan kami tumbuh 24,5% year on year menjadi 30,7 triliun melalui BNI Syariah.

Dalam melakukan penyaluran pinjaman BNI fokus kepada pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi prioritas yang memiliki multi player effect tinggi terhadap perekonomian, serta berupaya sangat selektif dalam pemilihan debitur-debitur yang berkualitas.

Berdasarkan komposisinya kredit BNI paling didominasi oleh sektor-sektor perindustrian 19,1% dan perdagangan, restoran dan hotel 18,2%. Dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan kredit terbesar di BNI di Q1 2019 adalah pada sektor pertambangan yang tumbuh 34%, konstruksi yang tumbuh 33,1% dan jasa dunia usaha yang tumbuh 30,3%.

Lanjut, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah, kontribusi langsung BNI terhadap Pemerintah dalam bentuk setoran pajak dan pembayaran deviden juga terus meningkat. Ini sejalan dengan terus semakin meningkatnya probabilitas BNI. Untuk tahun buku 2018, BNI memberikan pembayaran deviden sebesar 25% atau totalnya sebesar 25% dari laba BNI 15 triliun. Dengan demikian, pembayaran deviden BNI untuk laba tahun buku 2018 mencapai 3,75 triliun. Di mana dari total deviden tersebut deviden porsi Pemerintah adalah sebesar 2,25 triliun atau 60%.

Bila ditambah dengan pembayaran pajak BNI hingga Mei 2019 sebesar 3,82 triliun maka total kontribusi langsung BNI kepada Pemerintah dari Januari hingga Mei 2019 mencapai 6,08 triliun. Apabila di total sepanjang 2014 hingga Mei 2019 total kontribusi BNI terhadap pendapatan negara telah mencapai 46,7 triliun. Berupa pembayaran porsi Pemerintah sebesar 12,1 triliun dan pembayaran pajak sebesar 35,9 triliun.

Berikutnya adalah peranan BNI di dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu komitmen utama BNI adalah mendukung program pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kredit infrastruktur BNI yang tumbuh

6,3% year on year pada Mei 2019 menjadi 112,5 triliun. Pembiayaan infrastruktur BNI hingga Mei 2019 terdiri dari 33% jalan tol dan konstruksi, 32% ketenaga listrikan, 25% transportasi, 10% telekomunikasi, dan 9% minyak dan gas bumi. Bila di bandingkan dengan total pembiayaan BNI, pembiayaan infrastruktur BNI mencapai 22% dari total pembiayaan BNI. Di mana komposisi pembiayaan infrastruktur ke BUMN mencapai 66% dan non BUMN 34%.

Lanjut, sebagai salah satu bank penyalur KUR, BNI terus berusaha untuk menyalurkan KUR kepada para pelaku usaha kecil sepanjang 2017 hingga Mei 2019 total KUR yang disalurkan BNI telah mencapai 63 triliun kepada sekitar 580 ribu debitur. Sedangkan untuk Januari hingga Mei 2019 BNI telah menyalurkan KUR sebesar 8,2 triliun kepada 95 ribu debitur di seluruh Indonesia. Di mana sekitar 43% atau 3,5 triliun disalurkan kepada sektor produktif, diantaranya pertanian 1,65 triliun dan jasa-jasa 1,08 triliun dan industry pengelolaan 0,71 triliun. Penyaluran KUR BNI masih dominan di Pulau Jawa, yakni 61% dari total penyaluran, diikuti Sumatera sebesar 19%.

BNI tetap berkomitmen untuk mensukseskan program penyaluran Bansos non tunai dan program Indonesia pintar di tahun 2019, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya hal ini sejalan dengan amar Presiden yang mengharapkan seluruh penyaluran Bansos dan subsidi dilakukan secara non tunai dan melalui perbankan agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Penyaluran Bansos non tunai dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Untuk saat ini KKS telah digunakan untuk program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan non Tunai. Berdasarkan data yang ada untuk tahun 2019 hingga posisi 11 Juni 2019, BNI telah menyalurkan dana PKH sebesar 7,6 triliun kepada 4,2 juta keluarga penerima manfaat. Dan telah menyalurkan PBNT sebesar 4,1 triliun kepada 6,3 juta APM.

BNI juga aktif dalam mendukung program kartu tani dan perhutanan sosial. Kartu Tani adalah program penyaluran subsidi pupuk Pemerintah kepada petani yang dilakukan secara non tunai dan melalui perbankan. Hingga Mei 2019, BNI telah menerbitkan Kartu Tani kepada 2,5 juta petani serta menyalurkan KUR sebesar 939 miliar.

Perhutanan sosial adalah program pemberian lahan yang tidak termaksimalkan untuk dikelola masyarakat sebagai lahan pertanian. Hingga Mei 2019, BNI telah membantu penyaluran 61,4 ribu hak pengelolaan lahan kepada lebih dari 19 ribu warga masyarakat serta telah menyalurkan KUR Mikro senilai 31,27 miliar rata-rata 8,5 juta per debitur kepada sekitar 3.702 warga yang membutuhkan tersebut.

Untuk tahun penyaluran PK dan BL untuk tahun 2019 hingga Mei 2019, BNI telah menyalurkan program kemitraan dan bina lingkungan sebesar 136 miliar, terdiri dari program kemitraan hingga Mei mencapai 41,1 miliar atau naik 346% dibandingkan dengan Mei 2018 sebesar 9,2 miliar. Kemudian untuk program bina lingkungan mencapai 95,85 miliar didominasi oleh penyaluran pada bidang pendidikan, sarana ibadah dan ibadah dan sarana umum.

Selanjutnya adalah tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI pada BNI. Dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun buku 2015 sampai dengan semester I tahun

2016, BNI telah menerima telah dilakukan pemeriksaannya oleh BPK RI sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama terkait dengan audit pengelolaan operasional kantor cabang luar negeri di New York, Tokyo, London untuk tahun buku 2015 yang dilaksanakan di tahun 2016. Kemudian pemeriksaan kedua adalah audit pengelolaan kredit segmen korporasi tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017. Yang ketiga, audit pengelolaan kredit BNI Griya untuk tahun buku 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018, serta yang keempat adalah audit aktifitas divisi internasional dan kantor cabang luar negeri London tahun buku 2017 dan semester I tahun 2018 yang dilaksanakan di tahun 2018.

Adapun hasil pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut dapat kami laporkan sebagai berikut. Terdapat 130 rekomendasi tindak lanjut yang kami terima dari BPK RI. Dengan catatan jumlah tersebut belum termasuk hasil pemeriksaan aktifitas divisi internasional dan kantor cabang luar negeri London untuk tahun buku 2017 dan semester I 2018. Karena kami belum terima masukan dari BPK. Untuk 130 rekomendasi yang diberikan kami telah melakukan tindak lanjut dan 106 rekomendasi atau 82% telah dinyatakan sesuai oleh BPK RI.

Terdapat 24 rekomendasi atau 18% yang masih belum sesuai pemenuhannya. Di mana pada grafik sebelah kanan dapat dilihat berdasarkan periode pemeriksaannya, yaitu sebagai berikut. Untuk audit pengelolaan operasional kantor cabang luar negeri New York, Tokyo, London, untuk tahun buku 2015 seluruh rekomendasi yang berjumlah 56 yang telah dilakukan penyelesaian dan telah sesuai.

Kemudian 11 item rekomendasi dari audit pengelolaan kredit segmen koperasi untuk tahun 2016 belum sesuai pemenuhannya atau 20% dari total rekomendasi. Kemudian 13 item rekomendasi dari 11 audit pengelolaan kredit BNI Griya untuk tahun buku 2017 belum sesuai pemenuhannya atau sebesar 68% dari total rekomendasi.

Selanjutnya terhadap 24 temuan yang masih belum dinyatakan selesai, pada tanggal 3 Juli yang lalu kami telah menyampaikan kembali update penyelesaian atas 24 rekomendasi. Saat ini kami menunggu pendapat dari BPK apakah dari 24 yang belum kami tindak lanjuti dan telah kami tindak lanjuti kita laporkan apakah itu sesuai atau belum kami sedang menunggu.

Demikianlah Bapak dan Ibu Anggota Dewan hasil daripada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI untuk tahun buku 2015 sampai dengan 2018.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak-bapak atas pemaparannya.

Kita masuk kepada pembedaan oleh para Bapak dan Ibu Anggota.

Saya persilakan Ibu Eva Sundari.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Terima kasih Bapak-bapak Pimpinan Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI.

Saya sekilas melihat laporan BPK yang sudah di-review oleh teman-teman BAKN tapi saya gembira dengan laporan tadi dari misalkan di BNI sudah menindaklanjuti dan yang tidak sesuai sangat kecil sekali, 18%, 20% dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.

Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena dari laporan dilapangan, misalkan saya mendapatkan tangkapan bahwa teman-teman di BNI misalkan sangat fleksible dalam membuat adjustment-ajustment untuk merespon kebutuhan dari pelaku ekonomi rakyat yang kemudian bisa supaya mereka bisa dapat akses terhadap KUR.

Contoh yang saya sangat senang misalkan atas permintaan buruh tani, maka dibuat penyesuaian KUR seperti ini, atas permintaan yang spesifik dari teman-teman pelaku bisnis yang penghasilannya sangat fluktuatif mereka juga sangat responsive. Demikian juga dengan BRI yang juga membuka peluang untuk memberikan KUR secara berkelompok di Dapil saya dan itu sungguh menyenangkan.

Meski demikian saya juga memberikan beberapa catatan misalkan kalau pada temuan BPK yang luar biasa dan saya bandingkan dengan bank-bank yang lain BNI misalkan itu banyak permasalahan yang ditemukan BPK dari manajemen cabang-cabang yang diluar negeri Pak. Ini di BRI sedikit sekali hanya berkaitan dengan potensi loss yang sangat merugikan negara akan tetapi kecil sekali. Jadi pertanyaan saya kira-kira problem utama dari BNI sehingga temuan BPK-nya sangat banyak terhadap kinerja-kinerja yang ada di luar negeri itu apa salah assessment awal sehingga sumber daya manusianya juga tidak sesuai dengan kebutuhan disana seperti apa. Jadi saya hanya evaluasi dan pembelajaran kira-kira apa memang belum waktunya untuk buka cabang disana, sehingga banyak persoalan di cabang luar negeri yang kemudian tidak sesuai dengan standar dari kinerja.

Saya gembira tadi membaca sekilas dengan kinerja mandiri atas rekomendasi BPK berdasarkan audit kinerja. Ini yang saya sangat yakin untuk tahu lebih banyak tapi ternyata hasil temuan BPK juga menunjukkan hasil yang positif dari audit kinerja terhadap Bank Mandiri.

Itu saja Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya persilakan Bapak Johnny Plate.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota yang kami hormati.

Bapak Dirut BRI, BNI, Mandiri, Wakil Dirut seluruh jajaran direksi dan keluarga besar perbankan yang kami hormati.

Terkait dengan kinerja-kinerja korporasi, perseroan, indikator, pasti itu sudah banyak dibahas di Komisi VI DPR RI. Kalau disini tentu kita ingin melihat bagaimana peran serta, partisipasi perbankan negara kita dalam kaitannya dengan tentu kebijakan negara dalam kaitan dengan pembangunan nasional secara lebih luas. Untuk itu, yang pertama yang ingin saya bertanya barangkali ya, saya kira kita semua para direksi tahu kebutuhan investasi kita tahun 2020 sekitar 5.800 triliun. Bagaimana peran bank-bank negara kita, BNI, BR, Mandiri dan tentu dengan BTN nanti mengambil bagian dalam kebutuhan pembiayaan sebesar 5.800 triliun itu. Ini penting sekali karena dengan investasi sebesar itu tahun 2020 kita ingin juga mempertahankan tingkat pertumbuhan nasional kita di atas 5%, apa yang akan dilakukan.

Nah, sehubungan dengan itu untuk merangsang investasi dan perekonomian nasional tentu ini sangat terkait dengan tingkat kompetitif dari suku bunga kredit kita. Dari data yang disampaikan ini saya belum tahu berapa sih everange suku bunga kredit kita dibandingkan dengan seven days corporate Bank Indonesia. Yang disampaikan disini adalah net interest margin yang masing-masing di atas 5%, kecuali BRI saya belum tahu besar BRI karena datanya tidak ada. Nah, bagaimana kompetitifnya itu sehingga bisa merangsang kebutuhan investasi di dalam negeri yang begitu besar kebutuhannya. Tentu ada banyak kiat-kiat efisiensi yang akan dilakukan. Bagi kami yang paling penting bahwa dukungan pembiayaan untuk investasi itu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk mendorong pertumbuhan nasional kita.

Yang kedua, terkait dengan *agent of change*, bahwa korporasi ini akan berkeras sebagai korporasi, sebagai perseroan pasti bekerja untuk meningkatkan kinerjanya dengan tolak ukur-tolak ukur kuantitatif, apakah itu net interest margin atau secara keseluruhan berapa besar sumbangsuhnya kepada negara, baik pajak maupun deviden. Tapi yang ingin kita lihat ini dalam rangka, dalam kaitannya dengan *agent of change*. Bagaimana peran-peran yang dilakukan khususnya yang terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di berbagai sektor. Apakah itu di sektor mikro atau di sektor TKI itu bagaimana perannya itu dilakukan dengan efektif sehingga dia terasa. Apalagi ini ingin saya tekankan betul, distribusinya sebagai *agent of change* saya tidak melihat besarnya alokasi KUR yang sudah diberikan ini. Saya berterima kasih bahwa sudah cukup besar 87 triliun BRI, 12 triliun, 7 triliun juga untuk BNI dan seterusnya. Besarnya barangkali bagus saja itu sampai dengan platform KUR kita, tetapi distribusi spasial, distribusi secara regional, karena kalau kita ingin supaya dispasritas antar wilayah menjadi kecil justru peran *agent of change* ini harus lebih banyak di wilayah-wilayah yang memang tingkat kemiskinannya atau tingkat kesejahteraannya masih rendah.

Kalau program KUR ini semuanya di wilayah-wilayah yang tingkat pertumbuhannya tinggi, tingkat kesejahteraannya tinggi, income per kapita regionalnya tinggi, maka sasaran sebagai *agent of change* belum sepenuhnya dapat dicapai walaupun tingkat penyalurannya tinggi.

Dalam kaitan dengan itu, kami ingin kepada direksi sekalian untuk juga merangsang dan mengingatkan kantor-kantor regionalnya, kantor-kantor di daerahnya khususnya di wilayah-wilayah yang tingkat income per kapita regionalnya

masih kecil, masih rendah untuk lebih progresif disitu, untuk lebih tinggi disitu. Agar usaha bersama kita untuk lebih mendekatkan kesenjangan atau untuk menurunkan disparitas itu bisa kita peroleh. Saya mengambil satu contoh saja, daerah pemilihan Bapak Ketua Komisi XI DPR RI di NTT, baik NTT I atau NTT II agresifnya kredit usaha rakyat itu sebesar besar disana. Kalau disana di Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku atau wilayah-wilayah yang tingkat income per kapita regionalnya rendah, porsinya juga masih kecil, maka kita belum berhasil mengambil bagian dalam mengecilkan atau mendekatkan kesenjangan. Ini saya minta perhatian.

Secara nominal saya masih melihat KUR spasial masih terlalu rendah atau jarak antara pertimbangan komersial dengan *agent of change* sepenuhnya bisa didekatkan. Nah, ini mohon perhatian betul karena ini kebijakan negara, di Komisi XI DPR RI ini kita putuskan yang terkait dengan kesenjangan, disparitas itu disini bersama-sama dengan Pemerintah. Bahwa sebagian atau hampir semuanya yang hadir disini adalah *public company* itu betul. Tetapi *public company* itu adalah pertimbangan korporasi, sedangkan yang hadir disini adalah pertimbangan dalam konteks *agent of change*.

Jadi saya ingin bertanya bagaimana porsi-porsi itu secara spasial. Kalau bisa itu dijawab secara tertulis, sehingga kita bisa melihat dan para direksi juga barangkali berikutnya bisa merangsang agar perannya itu lebih efektif dan lebih produktif di dalam rangka untuk memperkecil disparitas.

Yang kedua yang terkait dengan resi prokal, perjanjian-perjanjian internasional kita khususnya dalam kerangka asean framework agreement on services di sektor keuangan. Dari dulu ini selalu menjadi persoalan kita membuka diri betul, mendukung masyarakat ekonomi Asean meratifikasi banyak sekali AFAS di sektor keuangan. Tetapi bagaimana peran perbankan nasional kita di tingkat Asean dalam rangka resi prokal ini. Apa hambatannya ada, apa peluangnya besar, apa kendalanya atau barangkali ada tekanan-tekanan tertentu dari pengalaman teknis dilapangan terkait dengan resi prokal. Kita sangat terbuka disini, kita menyiapkan karpet merah untuk keterbukaan itu. Apakah karpet merah yang sama didapatkan oleh perbankan negara kita di negara-negara Asean lainnya dalam rangka dengan resi prokal.

Jangan sampai nanti kita akan terlambat atau jangan sampai terbalik. Saking kita memperhatikan pembiayaan di dalam negeri yang begitu memang masih besar, yang begitu menarik, sampai kita lupa resi prokalnya yang jangka panjangnya juga barangkali menarik. Karena keterbukaan kita ini mengakibatkan memang begitu deras mengalir kompetisi di dalam negeri di sektor pembiayaan. Bahkan mungkin sudah sampai di tingkat yang begitu dalam di daerah-daerah kita. Nah, ini hanya untuk kesehatan dan kepentingan perbankan nasional kita dalam pembiayaan.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini pertanyaan buat tiga-tiganya ya?

Silakan Bapak Sarmuji.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Direksi Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI yang saya hormati.

Pertama, saya ingin membuka kembali tentang net interest margin kita secara umum. Kalau saya lihat laporan yang disajikan ini misalkan BNI interest marginnya sampai 5%, sementara pada beberapa bulan ini itu ada kenaikan seven day rate Bank Indonesia. Itu artinya, secara rata-rata, secara umum saja kita bisa asumsikan kalau NIM-nya itu 5% terus ada kenaikan suku bunga Bank Indonesia, itu berarti ada kenaikan suku bunga kredit dan tentu saja sebenarnya ini dari sisi sektor riil ini tentu menghambat pertumbuhan sektor riil, meskipun datanya ada kenaikan. Tetapi seandainya net interest margin kita itu bisa kita kurangi kita bisa lebih adil antara keinginan bank untuk mencapai laba yang setinggi-tinggi dengan visi dan misi bank untuk menjadi agen pembangunan itu bisa agak seimbang. Harusnya pertumbuhan sektor riil kita menjadi lebih bagus. Tapi karena NIM kita cenderung dipertahankan 5% bahkan 5% lebih dengan mengejar laba setinggi-tingginya itu berarti kredit kita, suku bunga kredit kita menjadi sangat mahal. Karena itu, ini perlu kita pikirkan antara keseimbangan dua hal ini. Menurut saya bank harusnya bisa lebih efektif lagi dan efisien lagi, sehingga untuk mengejar laba yang tinggi tidak perlu ada NIM yang tinggi, tetapi dihasilkan dari salah satunya dari efisiensi. Itu satu hal.

Yang kedua, di daerah-daerah terutama di Dapil saya, Dapil saya sama dengan Ibu Eva Dapil Jatim VI, Kediri, Tulung Agung, Blitar, itu masih sering ada keluhan tentang kredit mikro. Orang untuk mengajukan kredit mikro harus dengan agunan-agunan dan persyaratan-persyaratan tertentu yang sebenarnya dari sisi idealnya, dari sisi aturannya sudah tidak diperlukan lagi agunan dan sebagainya itu. Yang ingin saya tanyakan kira-kira kebijakan apa dari Bank-bank Pemerintah ini untuk mengurangi secara terus menerus keluhan-keluhan semacam ini. Saya ingin melihat ada progress sehingga kalau nanti kita datang ke Dapil lagi setidaknya-tidaknya keluhan itu semakin lama semakin berkurang. Saya tahu kebijakan umumnya ideal akan tetapi dilapangan faktanya tidak seperti seindang yang diinginkan. Karena itu, saya ingin mendengarkan kira-kira kebijakan apa dari bank-bank Pemerintah ini untuk mengurangi keluhan-keluhan itu, sehingga keluhan itu menjadi semakin lama semakin kecil.

Yang ketiga, terima kasih saya melihat laporan pertumbuhan kredit di sektor pertanian naiknya cukup bagus, ada sampai 18,8% dan sebagainya. Ini kalau bisa pertumbuhan kredit sektor pertanian semakin lama semakin tinggi, karena terus terang saya merasa berempati kepada petani-petani, mereka sudah sekali mencari kredit kadang-kadang dengan segala risikonya karena ada kemungkinan gagal panen, kemudian cara pembayarannya mungkin juga mereka tidak bisa perbulan dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau konsen disana, saya yakin nasib petani kita bisa kita tingkatkan. Barangkali ada modifikasi-modifikasi, saya dengar barangkali sudah ada modifikasi-modifikasi cara pembayaran kredit sektor pertanian. Kalau ini bisa

dilakukan modifikasi cara kredit, bayarnya pas panen dan sebagainya. Mudah-mudahan pertumbuhan kredit di sektor pertanian ini semakin lama semakin kita tingkatkan, biar nasib petani kita semakin lama semakin baik.

Barangkali itu Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Amir silakan.

F-PPP (HM. AMIR USKARA, M. Kes.):

Terima kasih Bapak Ketua.

**Pimpinan dan teman-teman Komisi XI DPR RI yang terhormat,
Bapak Dirut Bank Mandiri, Dirut Bank BRI dan Dirut Bank BNI yang saya hormati.**

Pertama-tama tentu saya ingin memberikan apresiasi kepada 3 BUMN perbankan yang bersama kita pada hari ini atas kinerja dalam rangka turut membangun bangsa ini melalui kinerja dalam bentuk deviden maupun pajak yang saya kira ini menjadi bagian dari angka-angka yang kita akumulasi dalam APBN untuk membangun bangsa kita.

Saya lihat dari sisi setoran atau kontribusi terhadap pendapatan negara ini cukup bagus, misalnya untuk tahun 2018 bagi BNI dengan 10,7 triliun tahun ini sampai Mei sudah 6,6 triliun lebih. Kemudian untuk Mandiri untuk tahun 2018 dengan 18 triliun, kemudian untuk BRI dengan 29,2 triliun dalam bentuk pajak maupun deviden. Saya kira itu angka-angka yang cukup signifikan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penerimaan APBN kita yang kita masukkan dalam porsi belanja.

Karena hari ini kita bicara terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, ada satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak-bapak Direksi yang hadir pada sore hari ini. Kalau kita lihat hasil pemeriksaan BPK dengan rekomendasi yang cukup banyak pada masing-masing perbankan yang ada, baik BNI, Mandiri maupun BRI yang hadir pada hari ini. Yang ada dipikiran saya kalau misalnya ternyata BPK tidak turun atau tidak melakukan audit terhadap BNI, Mandiri maupun BRI, kira-kira langkah apa yang dilakukan secara internal untuk bisa mendapatkan kalau saya menganggap ini penyelewengan atau kesalahan-kesalahan fatal itu kira-kira secara internal apa yang dilakukan. Karena kalau saya lihat ini misalnya dari BNI yang saya tangkap tadi dari beberapa temuan, misalnya fasilitas kredit pada PT. Trio yang 1,3 triliun yang berpotensi macet misalnya atau pada PT. DAN yang 12 juta US Dolar lebih misalnya ini juga berpotensi macet. Begitu juga di BRI misalnya fasilitas KMK promes pada PT. Trio 1,3 triliun atau kredit KMK pada PT. GTS di Mandiri 495 misalnya. Inikan setelah ada temuan BPK baru kita tahu. Bagaimana seandainya BPK tidak melakukan audit

terhadap industry, baik itu BNI maupun yang lainnya apa kira-kira ini juga berpotensi untuk bisa angkat. Karena misalnya kalau ini kita biarkan ini saya kira dengan misalnya 80 temuan dan lain-lain saya yakin itu BPK belum masuk kepada audit yang kita perintahkan biasanya dalam bentuk audit khusus. Artinya, saya ini masih audit yang general yang dilakukan oleh BPK sudah menemukan beberapa temuan yang kalau kita lihat dari sisi jumlah mungkin fantastis. Sekali pun mungkin dari sisi prosentase di masing-masing perbankan itu tidak terlalu besar. Apapun itu saya kira ini akan sangat berpengaruh.

Nah, sekali lagi saya ingin tanya kepada Bapak Dirut, baik BNI, Mandiri dan Bank BRI. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk pengendalian internal terhadap masing-masing perbankan, sehingga temuan-temuan yang ada dari BPK ini, itu bisa diminimalkan tanpa ada BPK turun. Karena kalau kita harus menunggu BPK turun saya kira memang BPK tidak bisa setiap saat turun. Pertama, karena dari sisi anggaran dan kedua mungkin volume pemeriksaan yang cukup besar. Jadi itu saya harap dari baik dari Dirut Mandiri, BRI dan BNI. Saya mau dengar langkah-langkah antisipasi maupun langkah-langkah kebijakan yang dilakukan untuk menjaga jangan sampai terlalu banyak kebocoran, seperti yang didapatkan dalam temuan BPK ini.

Saya kira itu saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Indah Kurnia.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat sore Bapak Supra, Bapak Tiko, Bapak Baikuni beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini.

Terus terang secara subjektif saya menyukai komandan-komandan tempur yang ada di depan Bank plat merah bertiga ini kawan-kawan saya yang sangat luar biasa. Coba tolong saya ditampilkan tadi waktu presentasinya Mandiri yang halaman pertama. Boleh tahu tidak saya apa pesan yang ingin disampaikan dan maksud dari pemilihan gambar yang sangat bagus tersebut. Dimana ada dua anak kita, SD yang satu menggunakan sepatu dan satu lagi tanpa alas kaki. Itu kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mandiri apa. Kami menunggu jawaban, mohon izin Pimpinan, interaksi. Bisa disampaikan sedikit apa filosofi dari penampilan anak SD.

DIRUT BANK MANDIRI:

Baik Ibu, ini menarik karena waktu gempa di Palu itu kami Himbara dan beberapa BUMN itu diminta membangun hunian sementara di Sigi dan di Palu. Nah,

ini salah satu lokasi di hunian sementara kami di Sigi kita bangun rumah sementara dan sekolah sementara. Dan ini foto waktu anak-anak SD ini pasang sendiri bangku-bangku mereka untuk mengisi waktu mereka mau sekolah lagi.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Siapa namanya yang paling depan Mas Tiko, sempat nanya tidak. Yang depan itu namanya siapa? Sarmuji katanya. Pertanyaannya sekarang anak itu punya alas kaki tidak ya, karena di Surabaya saya bersama kawan-kawan setiap tahun itu memberikan 10 ribu sepatu bersama kawan-kawan kepada anak-anak sekolah yang SD itu setiap tahun kami melakukan kegiatan yang itu. Jadi waktu saya melihat ini sangat bagus sekali. Ternyata sepatu itu hal yang sangat penting bagi anak-anak kita untuk merasa percaya diri di dalam berangkat sekolah untuk mendapatkan pendidikan.

Terima kasih untuk penjelasannya.

Pertama tentu saya sangat mengapresiasi dari seluruh pemaparan yang disampaikan khususnya untuk performa keuangannya dari ratio-ratio kinerja keuangan disampaikan tadi semuanya cukup baik, meskipun mungkin satu, dua, mungkin tadi termasuk saya yang masih menyoal tentang NIM perbankan nasional kita yang memang masih cenderung tebal 5% ke atas, Meskipun Bopo-nya sih bagus, artinya tidak mencapai lebih dari 70 sekian masih oke, tetapi tentu kalau misalnya orientasinya adalah mendapatkan laba sebanyak-banyaknya mungkin bisa bergeser, bukan bergeser akan tetapi ditambahkan orientasinya adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang setinggi-tingginya, sehingga paling tidak ada beberapa sektor yang bisa diberikan kemudahan-kemudahan pun juga kemurahan-kemurahan untuk biaya kredit yang akan disalurkan dari ketiga bank-bank kebanggaan kita ini.

Kemudian juga kontribusi terhadap penerimaan negara tadi saya lihat juga sudah cukup bagus semuanya. Saya melihat tadi dari BNI dalam pembangunan infrastruktur itu 33% untuk pembangunan jalan tol dan konstruksi. Saya menanyakan langsung kepada ketiga-tiganya. Itukan pembangunan jalan tol kita itu hanya karena sayang dan cintanya kepada bank plat merah ini maka saya hanya ingin konsen saya sampaikan pada kesempatan kali ini, agar kita semua prepare dan tidak nanti akhirnya tiba-tiba ketiga bank kebanggaan kita ini datang kemari untuk meminta PMN misalnya, yaitu tentang pinjaman yang diberikan kepada para karya-karya itu, seperti Waskita Karya, kemudian ada Wika, Hutama Karya, dan PT. misalnya seperti itu. Itukan ada pembangunan jalan tol misalnya seperti Waskita itukan sekitar 90 triliun kredit mereka yang 60 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan yang 30 untuk yang dagang.

Kalau misalnya ini tentang resiko ya Bapak-bapak sekalian, kalau misalnya katakan *let's say* bunga yang diberikan itu 10% berartikan kira-kira 1% setahun kalau 90 triliun berarti kira-kira hitungannya sekitar dibagi 90 triliun berarti 9 triliun setahun, kalau satu bulannya sekitar angsurannya pokok dan bunganya sekitar 700 miliar misalnya. Nah, kira-kira kemampuan, karena saya tahu inikan pengelolanya kan masih belum diserahkan kepada Jasa Marga masih Waskita pembangunannya. Kalau

seandainya mereka tidak mampu mengangsur atau tidak mampu membayar kira-kira bagaimana resiko yang akan dihadapi oleh ketiga bank kebanggaan kita ini.

Itu saja Pimpinan dari saya, meskipun kita semua tahu bahwa pembangunan jalan tol yang saat ini sedang terus berlangsung dan kami semua sangat menikmati adanya infrastruktur yang sudah mulai sangat membanggakan bagi bangsa dan negara kita.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bapak Hatari silakan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi XI DPR RI yang sangat saya hormati,
Bapak-bapak dari Pimpinan perbankan Bapak Tiko dari Bank Mandiri.**

Pada satu ketika Pak Tiko, saya melakukan pengiriman dengan cara RTGS. Saya mengalami kesulitan sehari-hari, bahkan saya mengatakan kepada staf bahwa waktu ketika nanti Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan perbankan saya angkat ini. Pas hari ini kita ketemu saya sampaikan. Sampai 2-3 hari, padahal di dalam satu kota dari Bank Mandiri kepada Bank Negara Indonesia, 3 hari selesai. Bisa dibayangkan itu, apalagi kalau dari BRI ke Pulau Halmahera yang berdekatan dengan Philipina, Bapak bisa bayangkan Bapak Tiko, kira-kira mungkin satu kali Pilpres lagi baru sampai. Tapi Bapak Tiko ini masukan saja, Bapak jangan simpan di hati, kita perbaiki.

Yang berikutnya Pak Tiko, saya melihat disini kinerja Bank Mandiri unggul, kemudian ada beberapa sukses dari dinamika perbankan ini. Hanya saya lihat disini Bapak Tiko, dari komposisi aset hanya tercantum disini aset-aset yang bersifat lancar saja, ada ketambahan dua pajak setelah pajak dan pajak sebelum pajak, *Sory tax before and tax after*. Ada satu komponen lagi disini saya lihat kok pertumbuhannya 0,33%. Tapi saya berharap bahwa angka-angka di dalam aktiva lancar bukan satu angka yang diabstraksikan. Pertumbuhan laba bersihnya 23,4% ini spektakuler. Dari urutan dalam satu tahun 12,4 dari pertumbuhan kredit NPL gross 2,68% kok diakhir tahun meloncat menjadi 23,4% mudah-mudahan angka-angka ini tidak diabstraksikan Pak.

Berikut mengenai KUR Pak, saya bandingkan di sini dengan Bank Negara Indonesia. Barangkali nanti datanya salah ya Pak, dari yang tersedia Pak Tiko dengan yang direalisasikan di 278,5 triliun dari platfon yang tersedia oleh Bank Mandiri itu realisasinya kurang lebih 177,80% atau penggabungan dari dua komponen ini setara dengan 29,5%. Jadi menurut saya ini kita belum melihat lagi di, Bank Rakyat Indonesia

inikan bank yang tertua di negara ini. Mudah-mudahan pasti penyaluran KUR dia akan *blinding* daripada semua bank yang ada di sini.

Ini informasi saja kepada Bapak-bapak yang ada disini. Pernah Komisi XI DPR RI menjumpai di satu daerah terkait dengan penyaluran KUR bahkan yang tertinggi Bank Internasional Indonesia yang sekarang Maybank ini. Kaget kami, inikan Bank Internasional Indonesia kemudian dilikuidasi entah apa namanya kemudian dikasih nama Maybank, Maybank inikan orang Malaysia. Tetapi sebaran dari Maybank ini sampai di pelosok-pelosok atau saya hafal kurang lebih 42.800 nanti Bapak cek lagi. Itu dari kantornya Pak, belum lagi ATM Pak, Bapak bisa bayangkan ini bank baru kemarin. Nanti Bapak cek lagi datanya.

Jadi mengenai Bank Mandiri tadi, kemudian ini Bank BRI ada sejumlah yang belum di selesaikan tindak lanjut dari audit BPK atau kurang lebih 54 komponen yang belum di audit oleh BPK. Masih menunggu penyelesaian tapi lain-lainnya ini kita lihat sudah baik. Realisasi KUR hingga Mei 2019 itu mencapai 44,3 spendingnya ini tidak jauh dengan Bank BRI. Belum sampai kepada BNI secara keseluruhan, sementara begitu nanti kita cek lagi data.

Jadi perbedaannya kira-kira begitu tapi saya lebih fokus tadi kalau itu pengiriman melalui RTGS mohon itu diturunkan, tapi perkembangan terkini dan dinamika pasar, sentiment pasar dan lain-lain sesungguhnya Pak Tiko, baik sekali, sangat-sangat baik. Jadi sementara begitu, kita kembangkan lagi.

Terima kasih Pak Tiko.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, masih ada lagi Ibu dan Bapak sekalian?
Silakan.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Saya ada pertanyaan aspirasi Pak, saya hanya meneruskan bagaimana kah pertanyaan para Dirut terhadap tuduhan bahwa bank-bank plat merah pada posisi yang beresiko tinggi karena sudah digadaikan ke Cina. Ini penting saya tanyakan, agar pada momen yang menurut saya strategis ini masing-masing bank menjawab karena dari berbagai Sosmed ini yang sering dituduhkan kepada kita atau kepada Pemerintah Indonesia. Dan menurut saya kalau pernyataanya keluar daripada Dirut akan menentramkan dan kita juga punya referensi yang kuat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ada lagi?
Saya persilakan satu per satu Bapak Tiko, Bapak Supra dan Bapak Baikuni.

DIRUT BANK MANDIRI (TIKO):

Baik Pak, nanti kami jawab bersama juga pertanyaan-pertanyaan yang umum. Kami mulai mungkin tadi dari beberapa yang disampaikan yang khusus mengenai Bank Mandiri mungkin dari Ibu Eva yang terakhir sekalian. mengenai pinjaman dari CDB (China Development Bank) sebenarnya kami di Komisi VI DPR RI sudah beberapa kali dipanggil. Kami masing-masing mendapatkan 1 Billion Dolar atau Rp14 triliun dan ini pinjaman yang sifatnya b to b. Kami biasa bahwa di perbankan sebagaimana diketahui di kami selain dana pihak ketiga kami juga ada pinjaman-pinjaman. Jadi pinjaman kami bukan hanya dari Bank Cina sebagai contoh kalau di Bank Mandiri juga ada pinjaman dari JP Morgan, dari deutsche bank untuk pembiayaan terutama untuk pembiayaan valas kami, untuk membiayai proyek-proyek dalam bentuk valas. Jadi size-nya hanya 1 billion Rp14 triliun dibandingkan aset kami yang Rp1.200 triliun. Jadi secara resiko jauh Ibu, jadi pinjaman itu pinjaman yang normal sifatnya b to b dan merupakan sumber *fund* yang sifatnya kalau di kami diistilahkan sebagai *follow fund* untuk membiayai proyek-proyek yang dalam bentuk valas. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, karena itu merupakan pinjaman yang sifatnya normal dan b to b.

Kemudian dari Bapak Johnny Plate, tadi kalau kita sampaikan memang harus kami akui memang KUR di wilayah-wilayah yang tertinggal seperti Papua kami masih upayakan yang terbaik. Kami alokasi di total kalau NTT dan Papua total sekitar 400-500 miliar. Jadi memang dari total porsi kita yang 23 triliun masih kisarannya sekitar 20%. Jadi kami akan upayakan yang terbaik supaya ke depannya bisa kami...(suara tidak jelas)

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Interupsi Pimpinan, bisa untuk pendalaman sedikit.

Betul Pak Tiko, tidak saja besarnya berapa tapi penyaluran KUR di wilayah-wilayah itu jangan semuanya bertumpuk di sektor distribusi., di sektor hulunya juga penting, apakah hulu pertanian, hulu peternakan, hulu nelayan. Karena yang kami temukan itu terlalu besar alokasi KUR ini untuk sektor distribusi, yang distribusi ini pedagang semua. Ini tolong menjadi perhatian.

Terima kasih.

DIRUT BANK MANDIRI:

Komitmen kami dengan Kemenko bahwa kita akan arahkan supaya sektor produktif itu 40% ke depannya. Jadi pertanian, perikanan, dan kalau di kami di plasma sawit Pak, itu 40%. Memang kita akan melihat sesuai dengan kewilayahannya, sebagai contoh kalau di Papua itu Sorong kami arahkan keperikanan Pak, karena banyak perikanan. Dan kalau di NTT itu kepada...(suara tidak jelas)

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Interupsi sebentar Pimpinan.

Pak, saya boleh interaktif terkait dengan pernyataan tadi bahwa kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu seperti apa maksudnya, yang memberikan KUR dan melakukan yang terbaik itu bagaimana itu maksudnya. Soalnya begini pada rapat kita yang sebelumnya tahun lalu kalau tidak salah, ada juga pertanyaan Bapak Tiko yang menyampaikan pada ruangan rapat ini bahwa KUR sebetulnya dari Mandiri itu tidak menambah nasabah baru, hanya mengganti saja judulnya kredit yang sudah diambil oleh nasabah-nasabah lama. Nah, apakah yang terbaik berusaha memberikan yang terbaik itu ada penambahan nasabah baru misalnya atau penambahan jumlah penerima KUR. Saya kira itu yang saya perlu penjelasan.

DIRUT BANK MANDIRI:

KUR tahun lalu plafon kami Rp14 triliun, tahun ini kita tambahkan Rp25 triliun. Jadi sebenarnya secara plafon kami juga meningkat tajam. Jadi sekarang nasabah kami sebagian besar baru Pak, dan memang yang sangat membantu terakhir adalah KUR terkait dengan sawit, karena kebetulan kalau Bank Mandiri banyak pembiayaan kepada plasma-plasma sawit. Jadi kami coba fokuskan kepada replanting dari sawit di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dan kalau di Jawa dan wilayah timur memang kita arahkan kepada perikanan dan pertanian.

NTT memang hasil bumi Pak, jadi klusternya sedang kami usahakan, karena kluster-kluster inikan biasanya harus sesuai dengan potensi wilayah. Kalau di Jawa kebanyakan pertaniannya adalah pertanian padi dan kalau di Papua, di Ambon itu banyak di perikanan.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Pimpinan, interaktif sekali lagi.

Seperti di NTT itu kalau tidak memberikan rangsangan pertama Pak, maka dia bagian tertinggal terus. Justru sektor-sektor itu harus bank-bank dalam kaitannya dengan Asian of change inikan tidak besar dalam portofolio-nya, tapi akan melibatkan banyak sekali. Seperti di sana Pemerintah menetapkan itu wilayah pariwisata, baik itu wisata alam atau wisata terkait dengan *local wisdom* disana. Nah, bagaimana bank-bank ini mengamil bagian untuk merangsang, apakah itu penenun atau apa saja dengan seperti yang begituan. Tapi ini melibatkan begitu banyak rakyat yang justru yang menjadi perhatian nasional kita yang selama ini barangkali terlupakan karena mereka tidak bisa bersuara. Kita inginkan bank-bank kita dalam rapat Komisi XI DPR RI ini adalah *channeling the voice of the wishes*, itu kira-kira yang kami maksudkan.

DIRUT BANK MANDIRI:

Siap Bapak Johnny, sebenarnya tadi Bapak sampaikan tenun. Kami kebetulan memang di sana ada RKB, jadi kita ada rumah kreatif dan kita memang fokusnya di tenun. Nanti kami akan ajak Bapak kesana untuk meninjau kesana, memang skalanya belum besar, jadi kami coba dorong di tenun.

Terus ada dua pertanyaan lagi yang ingin kami *address*, ini cukup penting yang terkait dengan NIM dan terkait dengan NIM dan juga terkait dengan AFAS...(suara tidak jelas)

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Interupsi sebentar Pak, Bapak soal NTT ini harus hati-hati Pak, ini Dapilnya Bapak Ketua sama Bapak JP ini. Bapak harus serius menanggapi.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Meluruskan Pak, itu Republik Indonesia yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh.

KETUA RAPAT:

Ini Dapilnya calon Menteri Pak.

DIRUT BANK MANDIRI:

Sangat serius Pak, siap Pak.

Kami coba jelaskan soal margin, margin ini sebenarnya kalau kami melihat dari suku bunga kredit Pak, dari tahun 2013-2014 yang lalu sebenarnya suku bunga kredit sudah menurun ke bawah 10% Pak. Jadi untuk kredit yang bersifat bisnis itu kisarannya dari 7,5% sampai 10%. Yang konsumtif itu range-nya lebih luas, kalau konsumtif sebagai contoh untuk KPR itu sudah di 6% Pak, hanya untuk kredit yang tanpa agunan yang ada di 12%. Nah, memang untuk bank-bank Himbara kebetulan kami ini bisa mendapatkan dengan besar karena porsi kasa kita besar. Jadi kalau dilihat funding kita masing-masing funding kita ini dikisaran 50%-60% porsi tabungan dan gironya, sehingga kita bukan mendapatkan laba yang besar dari year credit Pak, tapi biaya dana kita yang murah. Ini bedanya kami dengan bank-bank sebagai contoh di buku II, buku III yang banyak deposito Pak. Jadi pengiritan efisiensi kita itu Boponya karena biaya dana kita lebih murah Pak, tapi dari sisi biaya kreditnya kita tekan terus year-nya sekarang di bawah 10%.

Kemudian untuk AFAS Pak, memang kami semua aktif untuk berusaha berekspansi di luar negeri sebagai contoh kalau di Bank Mandiri kami fokus di Singapura, di Singapura kami dapat license untuk memperluas kepada layanan untuk manajemen Pak, sehingga kami bisa menangani nasabah perorangan atau individual

untuk manajemen. Kami juga mempunyai kantor remitensi di Malaysia yang kita akan coba untuk dorong menjadi *full branch*. Nah, kami kalau melihat Asean memang profil profitabilitas di Asean ini sebenarnya kalau di negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, sebenarnya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Jadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Ketua OJK dan KE Perbankan bahwa kami kalau Bank Mandiri ingin fokus kedua negara, yaitu Philipina dan Vietnam ke depannya untuk mencari target akuisisi disana karena Philipinan dan Vietnam dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun size ekonominya lebih besar dan persaingannya juga tidak seketat persaingan di Singapura, Thailand dan Malaysia. Jadi kita akan coba untuk mendapatkan ...(suara tidak jelas) Di Philipinan dan Vietnam Pak.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Sekalian Bapak Ketua ya, bahwa kalau itu maka kita perlu perhatikan juga yang Nyanmar dan Kamboja yang justru industry pariwisatanya sekarang berkembang sangat pesat. Jangan sampai kita terlambat juga.

Terima kasih.

DIRUT BANK MANDIRI:

Terima kasih Pak.

Tadi dari Bapak Sarmuji, saya rasa tadi sama ya Pak, terkait sama NIM daan dengan diusahakan untuk mikro Pak. Kemudian dari Pak Amir, ini terkait dengan BPK. Dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya selama berapa tahun terakhir fungsi SPI di masing-masing bank, satuan pengendali intern itu sebenarnya sudah sangat diperkuat. Jadi justru dalam diskusi kami dalam beberapa periode terakhir BPK juga banyak menggunakan temuan dari SPI kami. Jadi sebenarnya temuan-temuan BPK yang diekspose ini sebenarnya sebagian juga temuan dari SPI yang diperdalam lagi oleh BPK.

Dan *Insyah Allah* memang memang kami di bank-bank Himbara ini kami komitmen Pak, bahwa peran pengawasan dan kontrol apalagi dengan pengawasan ketat dari OJK ke depan memang ketaatan kami kepada complains kami, kepada peraturan perbankan maupun peraturan perbankan terakait dengan anti korupsi dan sebagainya akan kami perkuat Pak.

Memang dalam situasi-situasi tertentu seperti kondisi tahun 2014-2015 sebagai contoh waktu itu ekonomi menurun, ketika menurun itu memang muncul permasalahan-permasalahan. Nah, ini yang kami ke depan harus lebih hati-hati, yaitu untuk menghadapi siklus Pak, karena diperbankan kredit biasanya siklusnya tumbuhnya kencang lalu kemudian kalau ekonomi menurun NPL muncul. Nah, ini ke depan memang yang paling penting dari kami adalah membuat pressure untuk *counter cyclical* supaya pada waktu ekonomi lagi baik itu *policy* dan prosedur kredit kami tetap kita jaga agar tidak terlalu ekspansif dan tidak terlalu masuk ke sektor-sektor yang beresiko tinggi Pak. Sebagai contoh, kalau kita ketahui 2014 banyak sekali kredit yang bermasalah yang terkait dengan Himbara, sebagai contoh Pak.

Dan ini kita mencoba sekarang portofolio alokasi kita juga melihat siklus ini Pak. Nah, ini sebagai contoh sekarang dengan CPO harganya menurun ya kita coba realokasi ke sektor-sektor seperti *consumer*, *consumption* dan sebagainya. Jadi lebih kepada perbaikan.

Terima kasih.

F-PPP (HM. AMIR USKARA, M. Kes.):

Pimpinan, sedikit.

Ini terkait dengan SPI yang dilakukan oleh masing-masing internal bank. Seandainya itu bukan bagian daripada anak cabang, sebenarnya saya ingin sandingkan kira-kira yang ditemukan oleh bagian internal dari masing-masing perbankan itu dengan BPK itu yang mana yang banyak. Terus terang kalau saya lihat misalnya tadi ada temuan BPK sampai 80-an sekian, itu kan ada bayangan kita kira-kira berapa yang terjadi disana sekarang. Tentu kita memberikan apresiasi kepada seluruh Bapak Dirut yang ada hari ini tapi untuk pengawasan internal ini saya kira memang perlu diperketat karena kalau kita lihat hal-hal yang ditemukan oleh BPK itu kan juga sangat besar. Kalau bisa di sandingkan dan itu bukan bagian dari reses sebenarnya saya minta melalui Pimpinan itu bisa kita dapat.

Terima kasih Bapak Dirut.

DIRUT BANK MANDIRI:

Kami sampaikan secara tertulis Pak, perbandingan antara temuan internal dengan BPK.

F-PPP (HM. AMIR USKARA, M. Kes.):

Terima kasih Bapak Dirut.

DIRUT BANK MANDIRI:

Dan untuk Ibu Indah terkait dengan karya-karya, untuk proyek-proyek di sektor infrastruktur memang kalau kami lihat, karena *project base* dan tenornya panjang sebenarnya resiko untuk terjadi kegagalan itu tidak terlalu besar Ibu. Yang penting pada waktu project ini sudah berjalan itu kita tract apakah *traffic*-nya sesuai dengan proyeksi awal, kalau tidak bisa kita akan lakukan *rescheduling* atau kita lakukan *repackaging* ke *market*. Jadi dalam proses selama dua tahun terakhir kalau kita lihat diperbankan banyak juga kita alihkan kepada Reksadana terbatas. Di mana project itu kita stretch lebih panjang.

Kalau kami melihat dari project-project yang ada di Trans Java sebenarnya dengan seluruh Trans Java ini otomatis ruas-ruas yang tadinya tidak terlalu hidup pun akan meningkat. Tadi dari kita cukup khawatir bahwa ada ruas-ruas tertentu yang memang tidak terlalu *economical* sebagai contoh ruas Solo ke Ngawi, kemudian ada ruas antara Pejagan-Pemalang, tapi dengan sekarang terkoneksi semua ini *insya allah* *traffic*-nya akan membaik.

Yang Trans Sumatera sebagian besar memang disupport dengan VGF. Jadi kalau dari Kementerian Keuangan, Trans Sumatera beberapa ruas yang tidak *economical* itu memang ada support VGF dari Kementerian Keuangan. Jadi saya rasa dengan pola VGF di Trans Sumatera ini resiko kegagalan dari sisi pembiayaan juga menjadi lebih rendah Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ijin interaksi Pimpinan.

Jangka waktu yang diberikan berapa lama ya Pak?

DIRUT BANK MANDIRI:

Biasanya 10.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

10 tahun, sementara dana yang diterima oleh bank-bank inikan paling lama 12 bulan itupun kalau deposito. Tadi Bapak Tiko sudah menyampaikan bahwa Bopo-nya segitu karena memang simpanan mayoritas di tabungan bukan dana mahal, yaitu deposito. Nah, berarti kan akan kemungkinan itu likuiditas dari masing-masing mengganggu. Itu mungkin menjadi perhatian bersama. Tadi disampaikan pada saat menjawab pertanyaan dari Bapak Amir tentang temuan-temuan BPK yang juga dikuatkan dengan sistem pengendalian internal dari masing-masing bank. Juga selain itu adalah Bank Indonesia dan OJK sekaligus pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan bagaimana peran pengawasan regulator khususnya OJK terhadap bank-bank Pemerintah kita.

DIRUT BANK MANDIRI:

Tadi terkait dengan *mismatch*, sebenarnya di OJK juga sudah menerapkan *besel treaty*, di mana ratio-ratio yang digunakan juga membandingkan antara ketersediaan dana yang tetap dengan pembiayaan sangat panjang. Jadi sebenarnya OJK juga melalui *besel treaty* juga mulai pengawasi *mismatch* antara pembiayaan jangka panjang dengan jangka pendek. Jadi sebagian daripada pendanaan jangka pendek kami seperti tabungan dan giro itu sebenarnya yang secara *behavior* ada yang dimasukkan di dalam katagori jangka panjang. Jadi ini dijaga dalam ratio-ratio yang sekarang masuk dalam pelaporan rutin kepada OJK maupun kepada BI. Jadi *insya allah* juga *ratio base match* ini bisa terukur dan diawasi oleh regulator.

Dari sisi regulator OJK cukup ketat dalam pengawasan, jadi dalam berbagai aktifitas usaha kami mulai dari kredit, funding, transaksi produk-produk baru cukup ketat bahkan untuk produk dan aktifitas baru itu sebenarnya kita sangat ketat, karena aktifitas baru, produk yang sama tetapi ada variasinya itu harus melalui proses PAB yang kita masukkan di dalam RPB dan disetujui dulu baru bisa kita bikin produk baru.

Jadi sebenarnya pengawasan dari regulator Indonesia cukup ketat dan sangat terukur kualitas pengawas di OJK juga lebih membaik belakangan karena saya lihat juga disana banyak rekrutmen dari bank. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya kualitas pengawasan OJK selama 1-2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup baik.

Terakhir dari Bapak Hatari, mohon maaf kami akan perbaiki semoga ke depan tidak ada gangguan lagi dan kita harapkan nanti bisa support.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Bapak dari BNI tolong jawab.

KETUA RAPAT:

Ini mandiri dulu Pak, habis BRI baru BNI nanti.
BRI silakan.

DIRUT BANK BRI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Beberapa sudah disampaikan jawaban tadi oleh Bapak Tiko dan saya hanya ingin beberapa hal yang belum terjawab oleh Bapak Tiko. Yang pertama, Bapak Johnny sudah tidak ada ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita untuk peningkatan utamanya Pak, kita sudah membuat beberapa aktifitas. Pertama adalah di beberapa wilayah kita membuat wirausaha pertanian, di mana kita membuat beberapa skala ekonomi yang di dalamnya tentu kita lakukan berbagai hal termasuk kalau untuk pertanian tanaman pagi misalnya dengan skala ekonomi 4 ribu hektar kita berikan rise mill, drying, kemudian juga hand tracktor dan sebagainya, seperti yang kita lakukan di Tasikmalaya. Kita sudah sukses untuk pertanian organic, di mana mulai dari pupuk dan sebagainya sudah kita pilot project-kan dan sudah lumayan sukses dan hasilnya juga cukup untuk mengangkat ekonomi petani karena harganya jauh lebih mahal.

Kemudian di BRI juga kita tahun ini bangun namanya BRI finance center, ini tidak hanya untuk pertanian tetapi seluruh UKM yang intinya adalah lembaga yang selain untuk tujuan riset kemudian juga untuk net working, kemudian juga asistensi di seluruh yang terkait dengan UMKM, BMC, terus akan melakukan pembinaan di seluruh wilayah Indonesia dan tiap Kanwil ada BMC, ini yang akan membuat semakin efektif dan lebih bisa memberikan asistensi terutama yang terkait dengan net working dan sebagainya untuk UKM, tidak hanya untuk pertanian akan tetapi semua yang terkait dengan UMKM.

Kemudian juga kami terus kembangkan ini yang terkait dengan tadi Bapak Samurji. Bagaimana supaya keluhan tentang agunan dan sebagainya. Kami untuk mikro sudah membangun satu platform digital loan atau kredit dengan digitalisasi yang intinya adalah seluruh data-data yang ada di BRI mulai BRI kita bangun dulu, kita coba

masukkan di big data, kemudian kita lakukan skoring sehingga seluruh pelan-pelan ini karena tidak bisa dalam waktu singkat. Seluruh yang terkait dengan UMKM saat ini sudah lebih kita layani dengan teknologi. Artinya, tidak lagi terlalu banyak ikut campur manusia tapi bahkan ke depan dalam waktu dekat kita juga seluruh nasabah kita bisa masuk di aplikasi melalui skoring, sehingga mungkin hal-hal yang terkait dengan keluhan-keluhan agunan dan sebagainya banyak berkurang, karena dengan kita memanfaatkan big data tentu terkait dengan data base seluruh UMKM yang ada di BRI sudah cukup memberikan presentasi untuk masuk di skoring.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Ijin Pimpinan, interaksi sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Terima kasih atas penjelasannya dan saya kira itu langkah yang maju tetapi juga perlu dipikirkan. Inikan sebagian yang mengajukan kredit mikro itu, itu pasti orang-orang yang tidak melek teknologi, tetapi tadi sudah langkah bagus tadi itu. Tapi perlu dipikirkan orang-orang yang tidak melek teknologi ya mbok-mbok pasar itukan dia tidak melek teknologi akan tetapi justru dia mengajukan kredit mikro.

Itu Pimpinan, terima kasih.

DIRUT BANK BRI:

Memang benar sekali Pak Sarmuji, justru data base mereka sudah mulai kita masukkan, terutama tentu yang kita prioritaskan pertama adalah nasabah-nasabah BRI dulu Pak. Tapi diperkembangannya nanti seluruh yang terkait dengan UMKM utamanya adalah mikro data basenya kita sudah akan masukkan di big data kami, sehingga tidak terlalu sulit lagi sebagaimana yang terjadi mungkin perusahaan-perusahaan besar di luar negeri dengan pola skoring, dengan pola-pola ratingnya yang sudah mampu mewakili untuk kondisi perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula yang kecil nanti kita akan lakukan hal yang sama, sehingga dengan cara-cara yang seperti ini tentu akan lebih cepat dan layanan kami sekarang yang tadinya mungkin harus memakan waktu 2 minggu sekarang mengajukan hari ini besok pagi sudah bisa pencairan Pak. Ini yang terus akan kita kembangkan memang masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki dan seiring dengan terus berkembangnya teknologi mudah-mudahan kelemahan ini bisa sedikit demi sedikit bisa terasi dengan baik.

Kemudian Pak Amir, terkait dengan tadi langkah-langkah pengendalian internal. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Tiko, kami juga

memanfaatkan SPI. Kemudian kita juga terus menerus melakukan TNA dimana seluruh RM itu kita evaluasi kemampuannya dan terus kita lakukan penyegaran-penyegaran dan ini kita punya Korpu di Ragunan, sehingga mereka kita masukkan di Korpu sehingga segala sesuatu yang terkait dengan kelemahan mereka sedikit banyak pelan-pelan bisa menjadi lebih baik.

Kemudian kita juga memperkuat MR Pak, ini terus menerus juga kita review, baik yang terkait dengan kebijakan maupun dengan prosedur dan sebagainya. Jadi secara regular di Korpu kami melakukan hal yang terkait dengan bagaimana memitigasi dan memperkecil resiko yang ada.

F-PPP (HM. AMIR USKARA, M. Kes.):

Pimpinan, sama dengan tadi mungkin Bapak Tiko mungkin Bapak Dirut juga bisa sandingkan kira-kira temuan yang didapatkan berdasarkan SPI dengan BPK, supaya kami juga ada gambaran ternyata SPI di perbankan lebih efektif daripada temuan-temuan BPK, karena itu yang kami mau lihat.

Terima kasih.

DIRUT BANK BRI:

Terima kasih Bapak Amir.

Kemudian untuk Ibu Indah tadi sudah dijawab oleh Bapak Tiko. Memang kita terus melakukan review yang terkait dengan terutama Waskita Karya dan lain sebagainya. Kemudian juga sudah banyak langkah-langkah untuk masuk di ... (suara tidak jelas) Market, Jasa Marga sudah mengeluarkan EBA dan beberapa sudah ada juga RDPD dan sebagainya. Tapi walaupun ujungnya masih belum mampu untuk memperbaiki tentu kita harus restrukturisasi, baik untuk penjadwalan jangka waktu maupun untuk juga angsuran kreditnya.

Kemudian mungkin itu yang untuk BRI rasanya sudah semua.

Terima kasih saya kembalikan kepada Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Dari Cina, untuk soal Cina Pak.

DIRUT BANK BRI:

CDB ini sama dengan Bank Mandiri, kami kurang lebih menerima 1 Miliar Dolar. Dan ini memang sisi *liabilities*. Jadi sama Bu, seperti orang kita juga punya pinjaman ke orang-orang yang nabung di kita sebenarnya hampir sama seperti itu. Dan sebenarnya selain CDB justru juga banyak bank-bank asing juga meminjamkan kita. Jadi ini adalah satu praktek yang lazim di industri perbankan dan bukan hal yang aneh.

Dan ini akan terus dibutuhkan oleh industri perbankan kalau memang kita ingin tumbuh dan berkembang lebih, karena tentu kalau bunga dari bank-bank asing luar negeri atau dana-dana dari luar negeri lebih murah dari dalam negeri itu yang tentunya harus kita manfaatkan.

Mungkin itu Ibu Eva.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Berapa persen pinjaman dari Cina dibandingkan dengan yang lain.

DIRUT BANK BRI:

Labor plus 2,85 Bu.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Pimpinan, hanya untuk itu saja ya.

Sedikit untuk memastikan bahwa pinjaman dari CDB itu betul-betul bermanfaat untuk bank-bank nasional kita, untuk debitur kita. Itu dipinjam teruskan dan itu menguntungkan. Ini perlu jelas agar supaya publik jangan melihat ini barang haram yang mencelakakan negara. Ini supaya jelas juga bagi publik, pinjam-pinjam ini secara komersial b to b dan itu menguntungkan perbankan nasional kita, perbankannya, lalu itu mendorong investasi dan perekonomian nasional kita. Begitu kira-kira kesimpulannya, tolong secara tegas itu disampaikan sehingga tidak ada keraguan nanti di publik ini ributkan dan menjadi diskusi berkepanjangan yang membingungkan.

Terima kasih.

DIRUT BANK MANDIRI:

Bapak Johnny, Ibu Indah kami tambahkan satu lagi Ibu, bahwa di media sempat muncul, di Medsos bahwa ini digunakan untuk kereta cepat. Itu tidak benar, kami yakinkan bahwa itu tidak benar. Kereta cepat itu biayanya langsung *direct* oleh CDB b to b juga, jadi tidak ada yang di vestrum melalui bank-bank Himbara.

KETUA RAPAT:

Pak Baikuni.

Mau ulang tahun ke 73 BNI ya, kami Komisi XI DPR RI mengucapkan selamat ulang tahun buat BNI Pak. Semoga tambah sukses dan tambah berjaya Pak.

Silakan Bapak Baikuni.

DIRUT BANK BNI:

Terima kasih Pak.

Baik Pak, sebetulnya tadi beberapa pertanyaan yang terkait sifatnya tidak spesifik terhadap BNI ini sebenarnya sudah terjawab semuanya oleh Bapak Tiko maupun oleh Bapak Supra. Mungkin yang perlu kami tambahkan yang spesifik terhadap BNI, yang pertama terkait dengan temuan daripada BPK RI khususnya terhadap cabang luar negeri jumlahnya cukup banyak. Nah, faktor penyebabnya seperti apa sebenarnya kalau kita lihat cukup banyaknya relative juga karena 56 temuan di kantor cabang luar negeri itu bukan di satu cabang akan tetapi di 3 cabang, baik itu Cabang Tokyo, London, maupun New York. Jenis-jenis temuannya relative hampir sama. Nah, pada umumnya memang terjadi karena apa? karena memang kekurangan lengkapan daripada kebijakan-kebijakan atau sisdur. Nah, ini yang kemudian kita segera lengkapi.

Dan yang kedua, yang sangat menonjol adalah kekurangan daripada jumlah pegawai kita. Karena kita ingin efisien sehingga kita batasi dan sepertinya sudah 2 tahun terakhir ini kami sudah mulai menambah-menambah personil-personil kami yang ada di cabang luar negeri. Khususnya personil yang berasal dari at office yang kita sebut sebagai staf. Kalau dulu hanya 2, 3 orang sekarang kami bisa lebih dalam 1 cabang bisa hampir mendekati 6 atau 7 dan kami lengkapi untuk semua bidang.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Bapak Johnny Plate mengenai upaya-upaya yang dilakukan BNI untuk meningkatkan KUR khususnya di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi atau kesejahteraannya masih rendah. Nah, di NTT saja kami ceritakan akan tetapi di daaerah-daerah lain juga kita mengembangkan sistem cluster. Contohnya di NTT kita kembangkan cluster garam, kemudian juga cluster sapi, kemudian cluster kopi. Dan model-model seperti ini yang kami terapkan di masing-masing...(suara tidak jelas)

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Ketua, interupsi sebentar Bapak Ketua.

Cluster-cluster ini bagus juga untuk kunjungan kerja biar kita lihat, mungkin saja itu bisa menjadi model-model yang menarik untuk wilayah lain dari cluster-cluster itu.

Terima kasih Pimpinan.

DIRUT BANK BNI:

Di samping cluster tadi memang seperti halnya dilakukan oleh BRI juga, kami sedang menjajaki terus berkolaborasi dengan fintech-fintech untuk kami bisa menyalurkan pinjaman secara digital tadi. karena kami menyadari bahwa jangkauan kami tidak seluas apa yang dilakukan oleh BRI sehingga kami mau tidak mau harus kolaborasi dengan fintech-fintech ini dalam penyaluran kredit. Tentunya ini yang sedang kami dalam terus menerus.

Kemudian yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur tadi Bapak Tiko sudah menjelaskan panjang lebar tapi sebenarnya yang perlu kami sampaikan di sini bahwasanya kami ikut membiayai infrastruktur kami pilih-pilih juga, infrastruktur-

infrastruktur seperti apa yang kami ingin masuk. Jadi ada kebijakan-kebijakan kami, contohnya yang kami pilih pasti yang proyek yang IRR itu minimal 13%, kemudian debitur memiliki ... (suara tidak jelas) financing minimal 30%, kemudian kalau khusus jalan tol kita juga melihat bagaimana prediksi daripada lalu lintas hariannya. Kalau kita bicara trans Jawa pada umumnya memang lalu lintas hariannya cukup tinggi dan cukup bagus. Kemudian kami juga melihat bagaimana dengan status pembebasan lahannya, ini juga menjadi hal yang sangat penting.

Kemudian yang terkait dengan pinjaman daripada Cina tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Tiko dan Bapak Supra. Kalau di BNI sendiri dari total pinjaman kami kepada perbankan di luar Indonesia itu kurang lebih sekitar 5 miliar US Dolar. Nah, saat ini pinjaman CDB kurang lebih sekitar 800 jadi kurang lebih 25% dan jumlahnya menurun terus itu. Dan sepertinya memang hal seperti ini yang dikatakan oleh Bapak Tiko memang kami mengambil pinjaman memang karena kami ada kebutuhan untuk pembiayaan. Nah, kalau secara total komposisi daripada total kredit kita, BNI itu kurang lebih dari 521 triliun kredit yang kami salurkan 18% itu merupakan kredit valas. Jadi masih 82% ada merupakan kredit yang Rupiah tadi. Inipun kami juga ada kebijakannya kredit-kredit yang kami berikand alam bentuk valas itu adalah memang yang nasabah-nasabah yang menghasilkan devisa yang ekspor oriented. Kalau tidak ekspor oriented kami tidak memberikan kredit seperti itu. Seperti itu yang kami lakukan.

Kemudian rasanya itu Pak, tambahan jawaban dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tadi soal BNI Pak Hatari.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Saya takut nanti saya tidak kebagian jawaban dari Bank BNI.

Bapak dari BNI, terkait dengan peta distribusi penyaluran KUR BNI, begitu ya Pak. Saya lihat di *paper* ini seperti ada diskriminasi tapi mudah-mudahan Bapak tidak berniat seperti itu. Bapak lihat di halaman 9, debiturnya hampir 3.760 kurang lebih. Bapak dari BNI tahu di kawasan kami ini 6 provinsi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, ada 6 provinsi. Saya hitung debitur ini lebih kecil dari Sulawesi, padahal mungkin Sulawesi tidak sampai 6 provinsi, sama ya berarti kamu baru berdiri. Jadi jumlah debitur segitu, prosentase penyaluran ini 6% Pak. Nanti tolong Bapak jelaskan ini, kemudian Sulawesi 7%, wilayah Sumatera 19%, dan yang paling sangat spektakuler adalah hampir 62% di Jawa. Nah, alasan-alasan klasik ini sejak dulu mungkin sejak perang dunia II belum mulai alasan ini selalu di munculkan. Bahwa satu, kenapa Jawa selalu menjadi very-very priority dari kebijakan Pemerintah. Satu, potensi ekonomi, dan yang kedua jumlah penduduk. Sedangkan di kawasan di sana di Papua dengan yang lain-lain, satu itu

jumlah penduduknya sedikit, tersebar di mana-mana, disparitas penduduk, apalagi potensi ekonomi.

Jadi ini harapan dari Komisi XI DPR RI, kalau skema ini Pemerintah tidak merubah maka janganlah kita pernah berbicara kesenjangan, kemiskinan. Jangan pernah berulang-ulang bicara soal itu, karena itu permainan kata-kata. Kami bertiga ini kebetulan berasal dari kawasan timur, kami mewakili rakyat yang tinggal di lereng gunung, tidur di atas pantai dengan bertikarnya daun kelapa kering itulah kasur mereka, sangat memprihatinkan. Tadi kadang-kadang kami berpikir dan berdiskusi sebenarnya Nawacit yang ketiga ini apa sih sesungguhnya ini, terluar, terpinggir, termiskin, mulailah dari sana. Tapi apa yang kita lihat? Sudah mudah-mudahan Allah lebih tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Itu Pak, ini soal KUR ini. Dan KUR ini menjadi konsentrasi dari Komisi ini Pak, dimana-mana kami. Saya melihat *chard* ini dengan prosentase segini saya kemudian berasumsi jangan-jangan perbankan ini pesimistik terkait dengan pembayaran kembali, sehingga agunan saja sudah terasa berat, ini soal KUR ini Pak.

Kemudian ada sejumlah tadi Pak, saya melihat pemeriksaan BPK. Ada yang prosentasinya masih sedikit, ini yang belum terselesaikan ataupun kurang lebih disini 54 yang sedang dalam in proses. Kalau boleh Pak, ini dipercepat. Yang terakhir dari saya, kalau mau jawab silakan jawab, kalau Bapak tidak jawab Bapak simpan di hati saja.

Kemarin dengan Kementerian Keuangan kita juga angkat, hutang Pemerintah dan hutang swasta terkini terus meningkat. Ini pasti yang paling tepat menjawab ini adalah sektor perbankan. Hutang kita meningkat terus, baik Pemerintah punya hutang dan swasta punya hutang. Sementara kita butuh investasi, apalagi kita butuh pembiayaan infrastruktur. Pertanyaannya adalah Bapak-bapak dari perbankan ini dapatkah memberikan *government guarantee* kepada DPR RI bahwa APBN kedepan aman dan pembayaran infrastruktur ini juga aman. Saya pikir yang paling pas adalah sumbangan pemikiran dari pihak perbankan untuk ikut menjawab ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah jam 17.00 WIB, mungkin kita minta supaya bank-bank ini menjawab secara tertulis saja Pak, supaya lebih detail dan bisa lebih ini.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Tambahan pertanyaan Bapak Ketua, untuk yang dijawab tertulis saja. Ini berkaitan dengan peran OJK, kalau tadi dijelaskan oleh Bapak Tiko akhir-akhir OJK ini sudah mulai meningkat dari sisi pengawasan maupun pengaturan. Ini kalau dari bank lain seperti apa, kalau dari Mandiri saya masih curiga. Mungkin kalau dari BRI dan BNI pandangannya agak berbeda sedikit.

Saya kira itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, bisa kita bacakan kesimpulannya.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan, tambahan saja untuk PR Bapak-bapak sekalian dalam memberikan jawaban tertulis, yaitu keberadaan keuangan dan ekonomi digital. Nah, itu tantangan atau ancaman atau bagaimana menurut ketiga bank plat merah kita.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Sekaligus kalau begitu Bapak Ketua, titip saja untuk ketiga bank-bank kita. Untuk memastikan kehadirannya di daerah-daerah itu dan di cintai oleh rakyat di daerah atau debitur-debitur di daerah tolong juga rekrutmen-rekrutmen baru menyerap tenaga-tenaga lokal dari daerah, sehingga urbanisasi itu tidak perlu semuanya harus ke Jakarta, terdistribusi dengan baik ke daerah-daerah.

Saya melihat ini terlalu banyak ini lalu lintas provinsi jalannya. Tolong itu diperhatikan sehingga mereka bisa menetap di daerah sebagai ujung tombak perbankan kita yang hebat-hebat ini.

Terima kasih.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Sekolah saja pakai zonasi, tenaga kerja juga diharapkan begitu.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Bapak Ketua, dari ujung kaki sampai ujung kepala saya minta maaf, nol detik saja.

Bapak dari Dirut Bank BRI, pertanyaan di Dapil saya di Kabupaten Halmahera Selatan kalau laut tidak bersahabat stagnan seluruh, karena Bapak hanya menempatkan 3 dari terapung, ada 3 kapal, Bapak yakin. Jadi kalau laut tidak bersahabat kapal ini tidak bisa berlayar, seluruhnya aktifitas ekonomi total terhambat. Sampai-sampai orang tua mengirimkan SPP ke Ternate pakai apa Pak? 3 deri terapung di istilahkan, satu ada Saketa, satu ada di mana lagi, saya sampai naik kapal itu. Pertanyaan, deri yang bank tertua di Indonesia ini karena Bapak tidak bangun kantor kas di daerah itu. kalau memang tidak mampu ya minta bantuan kepada Komisi XI DPR RI, sampai Bapak bisa bayangkan 70 sekian tahun kita merdeka mereka mengeluh dengan air mata kepada saya.

Saya tanya Pak, kalau ini ombak tidak bersahabatm, hanya Tuhan yang tahu, 3 kapal deri terapung namanya. Itu kawasan yang begitu luas sumber daya alamnya luar biasa kok Bapak tidak terpikir membangun kantoer kas.

Itu saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya bacakan ya draft kesimpulan.

1. Komisi XI DPR RI meminta kepada Direksi Bank Mandiri Persero Tbk, Direksi Bank BRI Persero Tbk, Direksi Bank Negara Indonesia Persero Tbk, untuk menyampaikan secara tertulis penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang masih dalam proses penyelesaian dan telah selesai.

Bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada Direksi Bank Mandiri Persero Tbk, Direksi Bank BRI Persero Tbk, Direksi Bank Negara Indonesia Persero Tbk, untuk menyampaikan jawaban secara tertulis dan lengkap atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi XI DPR RI meminta kepada Direksi Bank Mandiri Persero Tbk, Direksi Bank BRI Persero Tbk, Direksi Bank Negara Indonesia Persero Tbk, untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Ini mumpung masih Anggota DPR RI silakan bicara yang banyak, nanti kalau sudah jadi Pemerintah tidak boleh bicara banyak-banyak.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Ditambah saja yang terakhir titik koma, “dalam rangka mendukung kebutuhan investasi 2019-2020”.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Pimpinan, saya melihat nomor 1 dan 2 bukan kesimpulan ya Pak, saya justru tadi ada diskusi yang menarik tentang KUR, itu diperbaiki distribusinya, lalu

penerimanya, itu yang kita diskusikan. Kalau nanti jawab tertulis kan bukan yang kita diskusikan. Jadi mungkin itu yang saya usulkan.

Terus yang kedua itu, kesimpulannya yang dari Bapak Johnny Plate tadi itu bahwa untuk meningkatkan investasi itu. Kalau nomor 1 dan 2 saya pikir bukan kesimpulan itu, karena tidak ada isinya disitu.

Terima kasih.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Tambahan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Pada point 3 yang sekarang jadi point ke-4 itu, itu sebenarnya yang kita diskusikan tadi lebih banyak bukan kinerja keuangan. Kinerja keuangan kan kita anggap beres semuanya sudah bagus. Tapi justru yang kita perdalam tadi itu fungsi perbankan sebagai intermediasi dan agen pembangunan. Jadi titik tekannya menurut saya di situ.

Terima kasih.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.):

Minta perbaikan dari tata kelola untuk KUR menurut aspek distribusi dan kelompok penerima. Tadikan ada diskusi bahwa penerimanya jangan nasabah lama, jangan retail, tapi didorong ke sektor-sektor produktif.

KETUA RAPAT:

Itu nomor 1 dan nomor 2 digabung saja, karena itukan permintaan kita, kalau tidak, tidak akan tertulis dalam kesimpulan kan tidak ada pegangan. Nomor 1 dan 2 digabung.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Sebenarnya nomor 2 sudah mencakup semuanya Pimpinan, kalau dia menjawab secara lengkap dan detail, lengkapnya seperti apa. Kalau dijelaskan satu per satu ya masing-masing pertanyaan kita tadi itu, tapi kalau nomor 2 itu memang mencakup semuanya, detail, lengkap.

KETUA RAPAT:

Nomor 1 hilang ya.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Itukan BPK.

KETUA RAPAT:

Yang nomor 2 saja, yang nomor 1 hilang.
Saya ulangi.

1. Komisi XI DPR RI meminta kepada Direksi Bank Mandiri Persero Tbk, Direksi Bank BRI Persero Tbk, Direksi Bank Negara Indonesia Persero Tbk, untuk menyampaikan jawaban secara tertulis dan lengkap atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada Direksi Bank Mandiri Persero Tbk, Direksi Bank BRI Persero Tbk, Direksi Bank Negara Indonesia Persero Tbk, untuk melakukan perbaikan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama aspek distribusi penyaluran dan kelompok penerima dari sektor-sektor yang produktif.

Setuju?

Dari Bank dari setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi XI DPR RI meminta kepada Direksi Bank Mandiri Persero Tbk, Direksi Bank BRI Persero Tbk, Direksi Bank Negara Indonesia Persero Tbk, untuk meningkatkan fungsi perbankan sebagai intermediasi dan agen pembangunan dalam mendukung kebutuhan investasi tahun 2019-2020.

Bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak dan Ibu sekalian.

Sebelum kita *closing* Bapak Tiko mewakili ketiga-tiganya untuk memberikan *closing remarks*.

DIRUT BANK MANDIRI:

Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk paparan kami hari ini terkait dengan BPK dan juga kinerja dan fungsi intermediasi perbankan. Tentunya kami ingin berterima kasih dan semoga hubungan baik antara kami semua dengan Komisi XI DPR RI berjalan dengan baik di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI sudah selesai.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.20 WIB)

Jakarta, 4 Juli 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**